

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah ( Al-Qur'an ) dan sunnah rasul (al-hadits) agama Islam mengajarkan/menyerukan kepada ummatnya untuk selalu berusaha mendapatkan kehidupan yang baik didunia dan akhirat. Oleh sebab itu, semua manusia ciptaan Allah dituntut untuk bekerja menyebarkan di muka bumi dan memanfaatkan rezeki pemberian sang maha pencipta. Untuk kepentingan kelangsungan hidupnya, perjuangan agama Islam serta membantu meningkatkan kesejahteraan umat-Nya

فَانشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَبْغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ - (الجمعة : ١٠)

Artinya :

*Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah*

*Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung ( Q.s. Al-Jum'at 10 )*

Dalam kondisi sekarang ini, masalah kesenjangan ekonomi yang terlalu lebar pada akhirnya akan berdampak terjadinya kerawanan sosial yang sangat berarti, sehingga akan timbulnya suatu permasalahan pengangguran, penipuan, bahkan sampai pada tingkat pembunuhan, dan lain sebagainya. Yang semua itu pada akhirnya akan berpengaruh pula terhadap stabilitas politik dalam negeri yang mengarah pada *disintegritas* bangsa.

Disisi lain, munculnya kebijakan ( Policy ) dan intervensi ekonomi global yang mengarah pada *liberalisasi* perdagangan dinegara-negara Asia Pasifik, yang konsekuensinya berpengaruh juga pada negara Indonesia, sehingga negara Indonesia harus mempersiapkan sumberdaya manusia ( SDM ) yang handal disamping menciptakan ekonomi yang mantap, sehat dan dinamis.

Untuk selanjutnya, setiap warga negara dituntut dan ditentang keras oleh kondisi zaman yang semakin berkembang dan maju pesat, untuk lebih memanfaatkan momen-momen yang ada dan bersaing secara *kompetitif* agar tidak terjebak dengan hal kesempatan untuk menjadi kaya sangat terbuka lebar dengan syarat tidak secara bathil, tidak merugikan orang lain dan selalu berdasarkan syariat Islam.

Oleh karena itu untuk mengatasi kondisi seperti itu diperlukan peran aktif pemerintah berupa dukungan, baik secara moril maupun material yaitu pemerintah sebagai *mobilisator* perekonomian Indonesia dalam mengawasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi rakyat agar tidak terjadi kesenjangan yang berlampau lebar antara orang kaya dan orang miskin. Sebab hal ini akan

berpengaruh terhadap stabilitas politik nasional dan mengganggu keamanan nasional yang akan berdampak menjamurnya kerawanan sosial yang terjadi disegala lapisan masyarakat Indonesia seperti yang terjadi belakangan ini.

Tindakan yang sangat efektif yaitu dengan pengadaan penyediaan sarana dan prasarana serta ditunjang oleh faktor lainnya. Yang semuanya itu diciptakan oleh pemerintah dalam usaha meningkatkan dan menghadapi pertumbuhan ekonomi rakyat yang sangat memperhatikan yaitu dengan cara meluaskan lapangan pekerjaan disegala bidang.

Sumitra djojohadikusumo (1981;34) mengatakan bahwa pada dasarnya ada dua macam cara untuk meluaskan kesempatan kerja yaitu :

1. Pengembangan industri, terutama jenis industri yang bersifat padat karya (*labour intensive*) yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja dalam proses produksi
2. Melalui proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan-jalan saluran air, bendungan, jembatan, dan lain-lain

Dengan peran aktif pemerintah dalam berbagai usaha mencapai kesejahteraan bagi warganya terutama dalam aspek ekonomi karena negara mempunyai kekuasaan yang sangat mutlak dalam pengaturan kekayaan alam dan penggunaan faktor-faktor produksi.

Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 yang berbunyi :

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pernyataan diatas, sesungguhnya tujuan pemerintah dalam usaha meningkatkan perekonomian rakyat sangat serius yaitu dalam segala bidang, terutama yang menyangkut soal hajat hidup orang banyak.

Agama Islam menetapkan harus adanya negara yang mengatur jalannya perekonomian dan menyingkikan timbulnya kebinasaan dimuka bumi. Negara berhak campur tangan dalam ekonomi dan berkuasa dalam mengatur pertimbangan dua prinsip yaitu prinsip memperjuangkan diri sendiri dan prinsip mengutamakan kebajikan dalam masyarakat ( Abdullah Z. Al-Kaaf : 2002: 110 )

Pada suatu sisi kelompok masyarakat yang berpenghasilan besar semakin sedikit, tapi jaringan bisfisnya semakin luas dan profitnya semakin tebal, pada sisi lain masyarakat berpenghasilan tipis. Ironisnya kelompok masyarakat yang berpenghasilan kecil itu berasal dari kalangan umat Islam, mengingat secara demografi umat Islam merupakan kelompok mayoritas.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya sarana yang berafaskan Islam yang mampu mengolah sumber dana umat, membina potensi sumber daya umat, serta mampu menjembatani interaksi antara pelaku ekonomi lemah dan pelaku ekonomi kuat sesama umat, demi membantu terwujudnya akses lembaga keuangan yang Islami bagi kepentingan serta kemajuan umat itu sendiri, yang dalam hal ini para pelaku ekonomi kuat yaitu para pemilik modal besar bisa menanamkan modalnya untuk diolah oleh lembaga keuangan yang terkait.

Untuk merealisasikannya serta keasadaran akan pentingnya sosial ekonomi umat, khususnya di daerah Bakung maka didirikan Baitul Maal Watamwil Pakungwati. BMT Pakungwati ini merupakan lembaga keuangan yang dalam usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana kepada anggota/nasabah BMT maksudnya juga sebagai lembaga keuangan yang menghitung dana anggota serta memberikan pembiayaan atau kredit kepada usaha-usaha *produktif* dan menguntungkan.

Kehadiran BMT Pakungwati di Kabupaten Cirebon sangat berperan serta berpartisipasi dalam kancan perekonomian Indonesia, terutama dalam masyarakat Bakung dan sekitarnya dan dalam pemberdayaan serta peningkatan ekonomi umat yang bertaraf ekonomi lemah dan senantiasa memerlukan uluran tangan yang berupa modal dari para pemilik modal yang ingin membantu dan peduli terhadap kelangsungan hidup mereka yang lebih baik, yang pada gilirannya akan terwujud kehidupan yang sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai wujud nyata dari cita-cita pembangunan Indonesia.

BMT merupakan lembaga informal yang menekuni masalah keuangan dan pemanfaatannya dengan dilandasi Syari'ah. Jadi jelas bahwa mekanisme BMT sesuai dengan aqidah Islam dan ahlak yang luhur.

BMT juga sebagai unit usaha yang berpegang kepada norma-norma bisnis yang berdasarkan ketentuan syari'ah. Maka dengan itu mulai bermunculan BMT-BMT baru yang melakukan operasionalnya di Kabupaten Cirebon, khususnya

dengan sejumlah program yang berprinsip kepada nilai-nilai syari'ah dan mengarah kepada kepentingan umat dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonominya.

BMT mempunyai dua sifat kegiatan cara perolehan dana yaitu :

1. Berifat sosial dalam bentuk menyalurkan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) kepada para Mustahik.
2. Bersifat simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan modal dengan sistem bagi hasil.

Kedua sifat kegiatan BMT diatas tersebut membuktikan bahwa kehadirannya dalam meningkatkan ekonomi umat, sangatlah penting dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat sebagai sebuah usaha untuk memberikan fasilitas finansial kepada mereka supaya meningkat, sehingga mereka mampu bersaing dengan orang lain dalam memperbaiki tingkat kehidupan ekonomi mereka.

Kehadiran BMT Pakungwati telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bakung, khususnya bagi penduduk yang berlokasi disekitar BMT tersebut dan yang menjadi anggota atau nasabah BMT.

Oleh karena itu pihak BMT pakungwati berusaha untuk memasarkan produk dan programnya dengan memperluas jaringan dengan lembaga-lembaga lain dan pengusaha-pengusaha kecil dalam rangka usaha menarik mereka agar terjadi sirkulasi keuangan yang tercepat dan terarah yang pada akhirnya akan memperluas dan mempercepat perkembangan BMT itu sendiri, sehingga tercipta kehidupan ekonomi masyarakat yang stabil dan harmonis serta mempersempit

Kesenjangan sosial ekonomi. Untuk itu usaha-usaha BMT Pakungwati yang termodifikasi dalam berbagai program masyarakat harus diatur sedemikian mungkin sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya, baik dalam mengarahkan dana masyarakat agar sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terhindar dari unsur riba yang akan menelantarkan umat manusia kejurang kemiskinan, permusuhan, kesengsaraan, kebatilan serta kedzaliman.

Dari pokok permasalahan yang dihadapi oleh pihak BMT Pakungwati adalah bagaimana bisa menyakinkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya BMT itu sendiri merupakan lembaga keuangan yang benar-benar beroperasi menurut syariat Islam yang tidak merugikan masyarakat akan tetapi sebaliknya bisa membantu mengembangkan usaha-usaha kecil mikro.

Maka dari itu penulis mencoba meneliti dan mengamati urusan tersebut untuk diajukan bahan skripsi. sejauh mana pelayanan BMT dalam pemberdayaan modal usaha kecil mikro terhadap nasabah dan mensosialisasikan produk-produk BMT itu sendiri, sehingga menarik untuk diteliti dengan mencari sumber-sumber permasalahan sebagai penyebab belum adanya keberhasilan pihak BMT tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk merumuskan masalah penelitian skripsi ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

## 1. Identifikasi masalah

### a. Wilayah penelitian

Dalam penelitian skripsi ini wilayah kajian penelitian mencakup ekonomi Islam, yaitu mengenai lembaga keuangan syariah.

### b. Pendekatan penelitian

Penelitian skripsi ini adalah menggunakan pendekatan empirik dan analisis terhadap buku bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

### c. Jenis masalah

Jenis masalah penelitian adalah pelayanan pengelola BMT terhadap nasabah dalam pemberdayaan modal usaha kecil mikro ekonomi masyarakat Bakung.

## 2. Pembatasan masalah

Penelitian ini hanya membahas pelayanan pengelola EMT terhadap nasabah/anggota dalam pemberdayaan modal usaha kecil mikro di daerah Bakung.

## 3. Pertanyaan penelitian

Dari beberapa tahapan diatas melahirkan beberapa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Pelayanan dalam hal apa saja yang dilakukan oleh pengelola BMT Pakkungwati kepada nasabah atau anggota dalam pemberdayaan modal usaha kecil mikro.



2. Faktor apa yang menjadi penghambat dan penunjang dalam usaha pemberdayaan modal usaha kecil mikro.
3. Bagaimana hasil yang dicapai nasabah dari pelayanan yang diberikan oleh BMT berkaitan dengan pemberdayaan modal usaha kecil mikro.

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **a. Tujuan**

Sejalan dengan judul skripsi penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelayanan yang dilakukan pengelola BMT pakungwati dalam pemberdayaan modal usaha kecil mikro di daerah Bakung.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan penunjang BMT pakungwati dalam usaha pemberdayaan modal usaha kecil mikro di daerah Bakung
3. Untuk mengetahui hasil yang dicapai nasabah dari pelayanan yang diberikan oleh BMT dalam pemberdayaan modal usaha kecil mikro di daerah Bakung.

#### **b. Kegunaan penelitian**

##### **1. Kegunaan ilmiah**

penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat terutama terhadap anggota dan nasabah BMT Pakungwati

## 2. Kegunaan praktis

Penelitian ini berguna sebagai suatu pengetahuan praktis tentang BMT yang berdasarkan syari'at Islam

## 3. Kegunaan Akademik

Sebagai suatu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon. Khususnya program studi ekonomi perbangkan Islam jurusan Syariah sebagai sumbang pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan

### D. Kerangka Pemikiran

Baitul mal wattamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Namun dalam perkembangannya, selain bergerak dalam bidang keuangan, sosial, atau pengelolaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) serta sektor riil (hertanto Widodo dkk 199: 81-82)

Dalam kegiatannya BMT mengembangkan usaha-usaha *produktif* dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.

Dengan diadakannya BMT maka masyarakat yang tidak mampu dalam menjalankan usahanya dapat dibantu oleh pihak lembaga, yang dalam hal ini adalah BMT. Karena persaudaraan dan perlakuan yang sama setiap Individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi tanpa pengimbangan tersebut keadilan sosial dan keadilan ekonomi, setiap

individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing pada masyarakat (M. Syafi'i Antonio 2001:14-15)

Karnaen dan M. Syafi'i Antonio (1999:85) BMT adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem *Mudharabah* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak, sehingga berkurang kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan usaha
2. Meningkatkan kesempatan kerja
3. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak

Disamping itu, BMT merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan syaria'ah mampu memberikan dampak yang *signifikan* bagi pengusaha kecil. Karena BMT memberikan pelayanan modal kepada mereka dengan kenyamanan tanpa dihantui oleh unsur riba, memberikan pelayanan yang cepat dan mudah sehingga mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain, termasuk rentenir. Dengan kemudahan prosedur dan persyaratannya, BMT telah memperluas akses usaha kecil terhadap sumber modal.

BMT memiliki badan hukum koperasi yang diatur dalam UU perkoperasian nomor 25 tahun 1992 bab 1 pasal 1 berbunyi :

“Koperasi adalah badan usaha yang berangotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Walaupun BMT sama dengan koperasi, tetapi dalam pengelolaannya menggunakan prinsip-prinsip syariah yang berada dibawah binaan Bank Syariah tersebut telah mendapatkan secara yuridis formil dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992, tentang perbankan UU. No. 10 tahun 1998.

Karena itu perlu adanya suatu lembaga yang bernapaskan Islam untuk mampu menggalang sumber dana umat, membina potensinya, menjembatani interaksi antara silemah dan sikuat, dan membantu terwujudnya akses lembaga keuangan yang Islami bagi kepentingan serta kemajuan umat itu sendiri.

Wujud dari kesadaran akan pentingnya sosial ekonomi umat khususnya di daerah Bakung Kac. Klangeran Kab. Cirebon didirikannya BMT Pakungwati. BMT Pakungwati ini merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dari dan kepada anggota. *Baitul mal* bersifat sosial sedangkan *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana anggota dan simpatisan serta memberikan pembiayaan atau kredit kepada usaha-usaha produktif dan menguntungkan.

Kehidupan BMT di Kab. Cirebon khususnya di daerah Bakung telah ikut berpartisipasi dalam kancah perekonomian Indonesia dan pemberdayaan ekonomi umat yang bertaraf ekonomi lemah dan senantiasa memerlukan uluran tangan berupa modal dari para pemilik modal yang peduli terhadap kehidupan mereka. Disamping memerlukan bimbingan mental serta keahlian

Untuk mengembangkan usaha kecilnya kearah peningkatan ekonomi yang lebih baik, yang pada gilirannya akan terwujud kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai wujud nyata cita-cita pembangunan Indonesia.

Oleh karena itu, BMT sebagai lembaga keuangan syariah telah mempunyai kekuatan hukum dalam operasinya yang berhubungan dengan masyarakat ekonomi rendah untuk peningkatan taraf ekonominya.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah ini meliputi (1) populasi dan sampel (2) jenis data (3) sumber data (4) tehnik pengumpulan data (5) tehnik analisis data.

1. Populasi adalah subyek keseluruhan penelitian (Suharsimi Arikunto: 1998:115) populasi dalam penelitian adalah seluruh anggota / nasabah BMT Pakungwati di Daerah Bakung Kec. Klagenan Kab. Cirebon berjumlah 250 orang.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto: 1998:117) yaitu dari populasi yang berjumlah 250 orang, tidak dijadikan sample semua sehingga sampelnya tidak totalitas. Jika subyeknya lebih dari 100 orang, maka diambil antara 10% -15% atau 20% - 25% atau lebih. Oleh karena itu peneliti mengambil sampel 25 orang.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan merupakan jenis data kuantitatif yang mana hasilnya merupakan presentasi dari hasil angket yang disebarkan pada anggota dan nasabah.

### 3. Sumber data

#### a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data primer yaitu diperoleh langsung dari lapangan (S. Nasution : 1995 : 143) yakni pengelola BMT Pakungwati, masyarakat yang menjadi nasabah, baik sebagai penabung ataupun anggota jasa BMT tersebut.

#### b. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data sekunder yaitu dari bahan bacaan, dokumen dan lain-lain (S. Nasution : 1995 : 143) dalam hal ini sumber kepustakaan, buku-buku, dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam hal ini penulis akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Metode Observasi yaitu pengumpulan data dimana sipeneliti melakukan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti.
- b. Interview/wawancara yakni pengumpulan data dimana sipeneliti melakukan dialog langsung dengan responden atau yang terwawancarai dalam hal ini adalah pihak-pihak pengelola dan nasabah/anggota BMT.
- c. Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono : 1999 : 135)

d. Metode dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, surat kabar, majalah, dan lain-lain, yang berhubungan dengan masalah penelitian (Suharsimi Arikunto : 1998 : 236)

5. Teknik analisa data

Penelitian ini melalui tahapan analisis sebagai berikut :

a. Pendekatan logis

untuk jenis data kualitatif yang diperoleh melalui observasi wawancara dan stjudi kepustakaan dianalisis dengan menggunakan pendekatan logika.

b. Skala prosentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana P : Angka prosentase yang diinginkan

F : Frekuensi (jumlah yang diinginkan)

N : Jumlah responden

100% : Bilangan konstanta (tetap)

(Anas Sudijono : 2003 : 40)

Sedangkan untuk nilai besar kecilnya hasil angket setelah dijadikan pengelolaan data, dapat dinyatakan seperti pendapat Suharsimi Arikunto (1998 : 246), yaitu :

Sedangkan untuk nilai besar kecilnya hasil angket setelah dijadikan pengelolaan data, dapat dinyatakan seperti pendapat Suharsimi Arikunto (1998 : 246), yaitu :

1. 76%-100% : Baik
2. 56%-75% : Cukup
3. 40 %-55% : Kurang
4. 0%-39% : Tidak baik